

	News Title : Lindungi Nasabah, Bappebti Selesaikan Aduan Secara Berjenjang	
	Media Name : hukumonline.com	Journalist : Fitri Novia Heriani
	Publish Date : 16 January 2024	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Kasan (Plt. Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Terbaru	Topic : Bappebti Selesaikan Aduan Nasabah secara Berjenjang

Lindungi Nasabah, Bappebti Selesaikan Aduan Secara Berjenjang

Sepanjang 2023, Bappebti menerima 177 pengaduan nasabah terhadap perusahaan pialang berjangka.

Oleh: Fitri Novia Heriani Bacaan 3 Menit



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyebut pihaknya menangani aduan dan menyelesaikan pengaduan secara berjenjang. Seluruh proses pemeriksaan, gelar kasus, dan penenaan sanksi telah dilakukan sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK). Hal ini disampaikan Plt. Kepala Bappebti Kasan merespons pemberitaan Ombudsman RI terkait penanganan pengaduan nasabah pialang berjangka.

Prosedur yang dimaksud mengacu ketentuan Pasal 61 UU No.32 Tahun 1997 (mana telah diubah menjadi UU No.10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK). Berikutnya, diatur lebih lanjut melalui Pasal 3 Peraturan Bappebti No.4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang PBK.

- Baca juga:**
- **UU PPSK Terbit, Bappebti Siapkan RPP Masa Transisi**
 - **Percepat Penyelesaian Laporan Masyarakat, Ombudsman Koordinasi dengan Bappebti**

"Bappebti menangani aduan dan menyelesaikan pengaduan secara berjenjang. Artinya, Bappebti tidak pernah diam dalam melindungi nasabah. Sanksi administratif yang dikenakan Bappebti merupakan hasil proses akhir atas pemeriksaan tim Bappebti pada penanganan pengaduan atas pelanggaran ketentuan yang sifatnya administratif," jelas Kasan di Jakarta pada Minggu (14/1/2024) sebagaimana dikutip dalam laman resmi Kemendag.



Anda bosan baca berita biasa?

Kami persembahkan untuk Anda produk jurnalisme hukum terbaik. Kami memberi **Anda artikel premium yang komprehensif dari sisi praktis maupun akademis**, dan diriset secara mendalam.

Hanya Rp42.000/bulan

Berlangganan Sekarang >

Kasan menambahkan—terkait permintaan pengembalian dana atau ganti rugi kepada Bappebti—disediakan jalur penyelesaian melalui pengadilan negeri atau proses arbitrase. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAKTI) menjadi pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan di bidang PBK. Hal ini sesuai pilihan penyelesaian perselisihan hukum yang tercantum dalam dokumen perjanjian pemberian amanat nasabah.

Lebih lanjut, Bappebti mengoptimalkan pengawasan untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat. Dalam strategi pengawasan tersebut, Bappebti melakukan beberapa langkah antara lain penguatan regulasi dan literasi, integrasi sistem aplikasi, dan penerapan sistem rating pialang berjangka.

Selain itu, penyelesaian penanganan pengaduan dan penguatan kerja sama dengan Kejaksaan Agung RI. Bappebti juga merupakan anggota yang beranggotakan dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

Di forum internasional, Indonesia menjadi anggota tetap Financial Action Task Forces (FATF) pada rapat pleno tanggal 25 Oktober 2023 silam di Paris, Prancis. Keanggotaan tersebut menunjukkan peran aktif Bappebti dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Selama 2023, lanjut Kasan, Bappebti menerima 177 pengaduan nasabah terhadap perusahaan pialang berjangka. Dari sejumlah aduan itu, 82 pengaduan nasabah telah selesai ditangani Bappebti sedangkan 95 kasus pengaduan masih dalam proses penyelesaian.

Hal terpenting yang dilakukan Bappebti—dalam mengurangi jumlah aduan—adalah penguatan regulasi dan literasi serta optimalisasi implementasi terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi PBK (LSP-PBK). LSP PBK didirikan berdasarkan Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) No. Kep.2048/BNSP/IX/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Lisensi LSP-PBK.

**Hukum
di sini!**

telah terdapat 48 asesor yang memiliki sertifikat LSP-PBK dari BNSP. Bappebti akan melaksanakan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia di bidang PBK dalam waktu dekat. Sertifikasi ini untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka (WPB) dan Wakil Penasihat Berjangka (WPA) melalui ujian kompetensi dan menerbitkan Tanda Lulus Ujian Profesi (TLUP).

Untuk menjadi WPB atau WPA, pemegang TLUP harus mengajukan izin kepada Bappebti untuk dinilai kembali kelayakannya. Melalui skema bertahap ini, sumber daya manusia di bidang PBK diharapkan akan lebih kompeten sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan demikian, hal ini akan mempengaruhi penurunan aduan nasabah di bidang PBK.

Penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi dan sumber daya manusia berkualitas, kata Kasan, adalah salah satu strategi taktis Bappebti dalam meningkatkan kinerja PBK. Strategi lainnya yaitu optimalisasi bursa crude palm oil (CPO), penguatan ekosistem bursa aset kripto, peningkatan transaksi multilateral—antara lain komoditas timah dan emas digital—serta pengembangan komoditas strategis lainnya. Optimalisasi sistem resi gudang dan penguatan pasar lelang komoditas serta perbaikan tata kelola layanan yang

**Hukum
di sini!**

lanjutan juga dilakukan Bappebti.